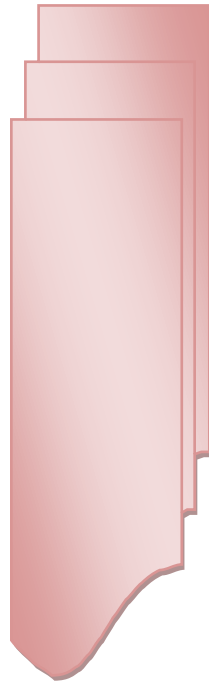




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETKAB. MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Bagian Adm.Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan merupakan salah satu unit Kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan

Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 24, mengatur Tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Disamping itu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati Morowali Utara.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3 Isu Permasalahan Utama Bagian Administrasi Pembangunan

Dalam penyelenggaraantugas dan fungsi, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagaibentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

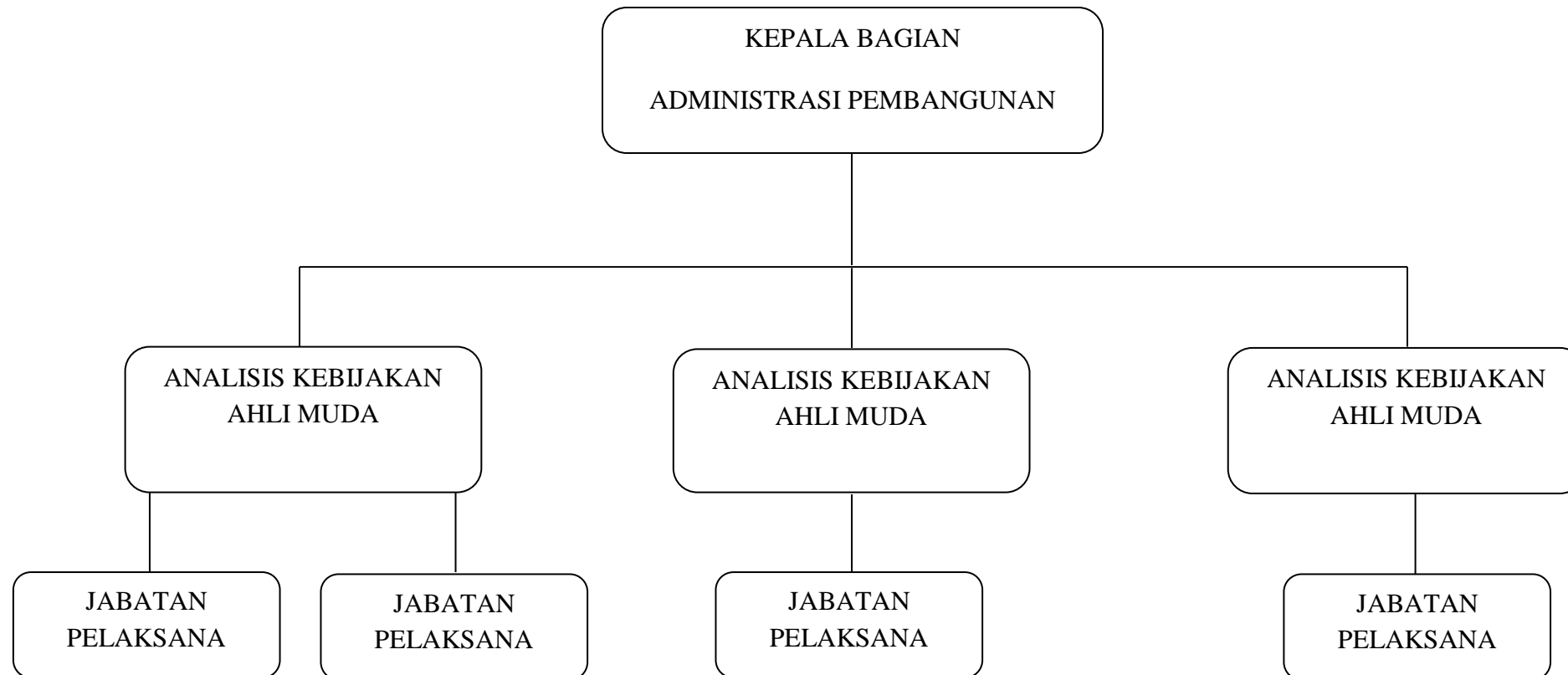
Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- Masih kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing sub bagian.
- Masih rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai.
- Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.
- Masih kurangnya tenaga ASN dilingkungan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- Minimnya anggaran yang diberikan pada Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

1.4 STRUKTUR BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara maka Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rencana Strategi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Strategi adalah pencapaian dari tujuan dan sasaran yang merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan adalah :

1. **Koordinasi**, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2. **Integrasi**, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
3. **Sinkronisasi**, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
4. **Simplikasi**, adalah upaya perumusan kebijakan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi **“Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”**.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;

4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Administrasi Pembangunan terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

2.3 VISI DAN MISI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.3.1. VISI

Dalam menentukan arah pandangan kedepan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan, interpretasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2021-2026. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel. ”

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi aparatur yang profesional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Meningkatkan Kualitas laporan pelaksanaan pembangunan yang transparan, bersinergi dan partisipatif.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

2.4 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan kinerja renstra Tahun 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian Bagian Administrasi Pembangunan dengan Kinerja Kepala Daerah.

**KESELARASAN KINERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



2.5 TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Tujuan

Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara menitik beratkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

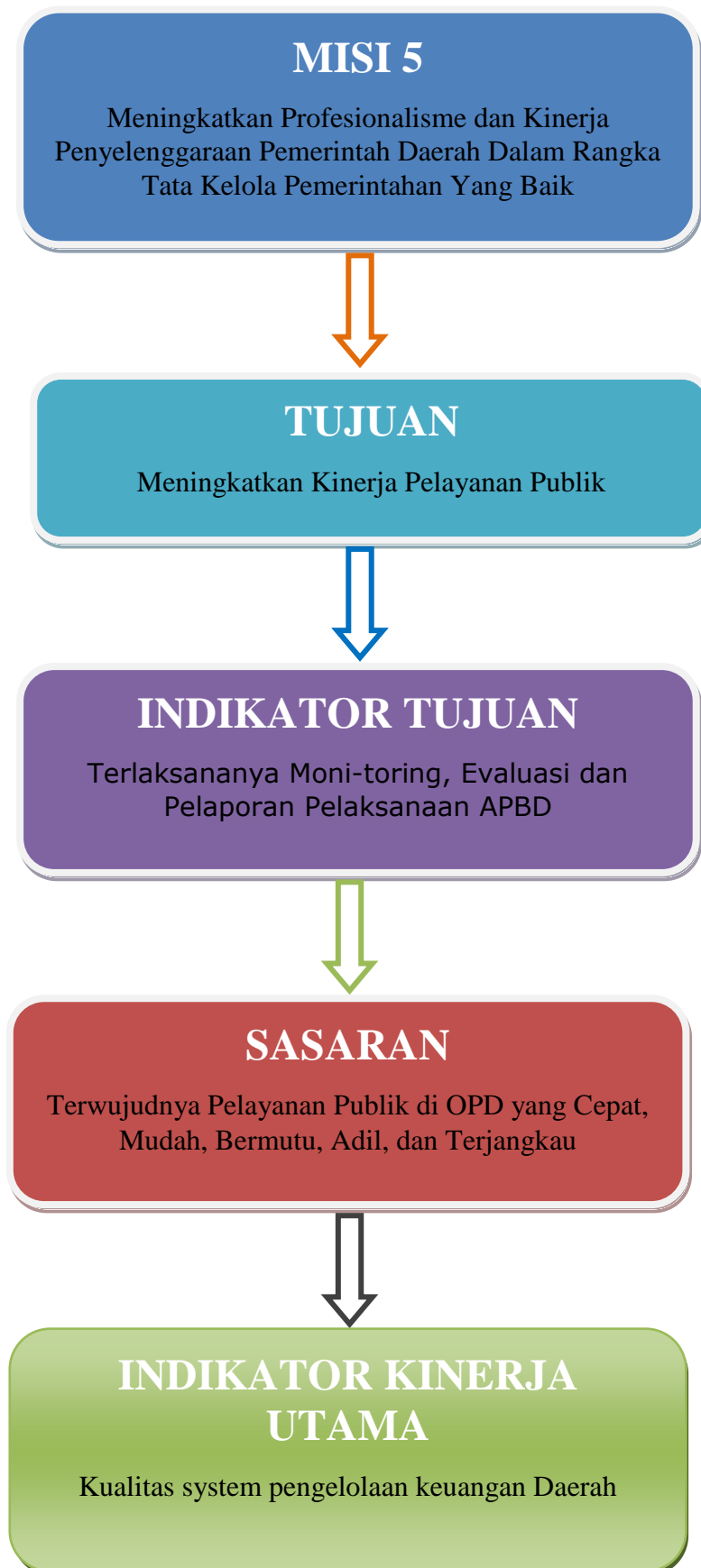
Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau

2.6 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisien pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Administrasi Pembangunan menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utara dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis. Berikut cascading Bagian Administrasi Pembangunan :

CASCADING BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Adapun Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Persentase pelayanan Publik		
		Program Pemerintahan Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan TEPPRA		Bagian Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Realisasi Kegiatan TEPPRA	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD	Tercapainya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD dbagi dengan Jumlah Rencana Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dikali 100%	Bagian Administrasi Pembangunan

2.8 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan yang telah dibuat:

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPPRA	2

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Rp. 362,301,500,00 APBD 2022
 2. Program Ekonomi dan Pembangunan Rp. 512,923,150,00 APBD 2022
- Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. **875,224,650,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)** .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPR	2	2	100%	Tercapainya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD dan Kegiatan TEPR

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 <$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Bagian Administrasi Pembangunan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal Tahun 2021 sebelum APBD perubahan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebanyak 3 sasaran dan 14 indikator. Akan tetapi pada akhir tahun 2022 setelah APBD perubahan ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 setelah APBD perubahan.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	$91 \leq$	1	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	0	Tinggi
3	$66 \leq 75$	0	Sedang
4	$51 \leq 65$	0	Rendah
5	≤ 50	0	Sangat Rendah
6	-		Tidak Tercapai
	JUMLAH	1	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPR	2	2	100%	√				
CAPAIAN RATA-RATA				100%					

1. Jumlah Realisasi Kegiatan TEPR

Mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama, maka dari tabel diatas terdapat perubahan indikator, yaitu Jumlah Realisasi Kegiatan TEPR dengan capaian Kinerja rata-rata **100%** dengan Predikat **Tinggi** . Ini merupakan capaian yang sangat memuaskan serta akan berdampak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021– 2026

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPR	-	-	2	100%

1. Jumlah Realisasi Kegiatan TEPR

Berdasarkan tabel di atas perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2021 masih kosong hal ini disebabkan karena adanya perubahan Indikator Kinerja pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Indikator Jumlah Realisasi Kegiatan TEPR pada Tahun 2022 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Administrasi Pembangunan, dengan persentase realisasi kinerja 2 dan capaian kinerja 100%. Berdasarkan hasil Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator dengan melihat realisasi kinerja dan capaian kinerja sesuai target yang telah ditentukan dan pencapaian kinerja

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Staregi (Renstra Tahun 2021-2026)

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perbandingan Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana
Strategis (RENSTRA) 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPR	-	-	2	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kerjanya $\geq 100\%$ (mencapai target)

1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Melihat perbandingan antara realisasi Perjanjian Kinerja dengan Capaian Hasil Kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara secara umum dapat dikemukakan bahwa sebagian besar telah berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sebagian kecil rencana yang belum tercapai adalah disebabkan oleh faktor-faktor diluar perencanaan.

b. Permasalahan

secara umum permasalahan di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara tidak ada, hanya saja perlu untuk meningkatkan kerjasama antar OPD secara khusus dalam penyampaian Realisasi Keuangan melalui TEPRRA .

c. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka langkah-langkah yang dapat diambil sebagai strategi pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas.

- Perlu dilakukan evaluasi antara realisasi dan capaian kinerja Pada Bagian Administrasi Pembangunan.
- Perlu kerjasama dan Koordinasi dengan OPD dalam hal penyampaian Realisasi Penggunaan Anggaran melalui TEPRRA.

3.6 Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana serta Anggaran yang mendukung kegiatan.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 823.490.650
2	Belanja Modal	Rp. 51.734.000
Alokasi Total Belanja		Rp. 875.224.650

Dari total anggaran sebesar Rp. 875.224.650 tersebut sampai akhir Tahun 2022.

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 741.577.950
2	Belanja Modal	Rp. 51.734.000
Alokasi Total Belanja		Rp. 793.311.950

Presentase serapan anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 741.577.950
2	Belanja Modal	Rp. 51.734.000
Alokasi Total Belanja		Rp. 793.311.950

$$a. \text{ Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 741.577.950 \times 100\%}{\text{Rp. } 875.224.650}$$

$$= 84.73\%$$

$$b. \text{ Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Alokasi Belanja Modal}}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 51.734.000 \times 100\%}{\text{Rp. } 51.734.000}$$

$$= 100\%$$

$$c. \text{ Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja} \times 100\%}{\text{Alokasi Total Belanja}}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 793.311.950 \times 100\%}{\text{Rp. } 875.224.650}$$

$$= 90.64\%$$

b. Keuangan

Jumlah pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 7 (tujuh) dan 7 (Tujuh) Tenaga Kontrak. Dari jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RPJMD Bagian Administrasi Pembangunan, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Administrasi Pembangunan periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR
SASARANTAHUN 2022**

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362,301,500	336,659,350	92,92%
		Program Pemerintahan Ekonomi dan Pembangunan	512,923,150	456,652,600	89,02%
Jumlah			875,224,650	793,311,950	90,64%

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Administrasi Pembangunan pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 1 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Bagian Administrasi Pembangunan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Kolonodale, Februari 2023

**KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

SINYO F. TOBIGO, SE
NIP.19720225 200701 1 011